

GUGAT CERAI KARENA MURTAD
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1419/PDT.G/2023/PA.MDN)

Oleh:
Regita Artanti Fauziyah
E1A020214

ABSTRAK

Perceraian dalam ikatan perkawinan terjadi ketika keharmonisan yang sulit untuk ditemukan dalam salah satu pihak atau kedua belah pihak. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.Mdn. adapun putusan tersebut mengenai perceraian perkawinan karena peralihan agama (murtad) yang dilakukan oleh Tergugat (suami).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana akibat hukum dari gugat cerai karena peralihan agama (murtad). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.Mdn mendasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam. Menurut pernulis, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 KHI dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b sebagai pertimbangan hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan karena gugat cerai dapat berakibat terhadap hubungan suami isteri dimana hak dan kewajiban hilang saat diputuskannya perkawinan. Akibat lainnya terhadap anak dimana bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik serta mengenai harta bersama diselesaikan dengan hukumnya masing-masing.

Kata Kunci: *Gugat Cerai, Murtad, Akibat Hukum*

DIVORCE LAWSUIT DUE TO APOSTASY
(STUDY OF VERDICT NUMBER: 1419/PDT.G/2023/PA.MDN)

By:
Regita Artanti Fauziyah
E1A020214

ABSTRACT

Divorce in marital bonds occurs when harmony is difficult to find in one or both parties. Such a case occurred in the Religious Court of Medan with Verdict Number 1419/Pdt.G/2023/PA.Mdn, which pertains to the divorce of marriage due to a change of religion (apostasy) by the Defendant (husband).

The research problem formulation is how the legal considerations of the judge and the legal consequences of filing for divorce due to a change of religion (apostasy). This study uses normative juridical research which is then analyzed qualitatively with secondary data processed through literature study.

The results of the study can be concluded that the judge's considerations in Verdict Number 1419/Pdt.G/2023/PA.Mdn are based on Article 39 of Law Number 1 Year 1974 concerning marriage in conjunction with Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 Year 1975 in conjunction with Article 116 letter f and h of the Compilation of Islamic Law. According to the author, the panel of judges may add Article 34 of Law Number 1 Year 1974 concerning marriage in conjunction with Article 80 of the Compilation of Islamic Law and the Explanation of Article 39 Paragraph (2) letter b in conjunction with Article 19 letter b of Government Regulation Number 9 Year 1975 in conjunction with Article 116 letter b as legal considerations. The legal consequences arising from the divorce lawsuit may affect the husband and wife relationship where rights and obligations disappear when the marriage is dissolved. Other consequences concerning children where the father and mother are obliged to nurture and educate them, and regarding joint property, it is settled according to their respective laws.

Keywords: Divorce lawsuit, Apostasy, Legal consequences